ANALISIS JUAL BELI UANG RUSAK BERDASARKAN FATWA DSN MUI NOMOR 28 MUI III 2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG PASAL 25 UU NOMOR 7 TAHUN 2011 (STUDI KASUS DESA TANJUNG KEC. PADANG TUALANG KAB LANGKAT)

Dwi Permata Sari¹, Ahmad Zuhri Rangkuti²

dwipermatasari778@gmail.com¹, ahmadzuhrirangkuti@insan.ac.id²

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

ABSTRAK

Abstrak Tujuan penelitian ini untuk melihat Analisis Jual Beli Uang Rusak Berdasarkan DSN MUI NO 28 MUI 2002 Tentang Jual Beli Mata Uang UU Pasal 25 NO 7 Tahun 2011 di Desa Tanjung Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat. Alasan penelitian menagakat penelitian ini karena di Desa Tanjung Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat banyak melakukan jual beli Uang rusak ini sejak dari tahun ketahun sehingga peneliti tertarik melakukan riset penelitian ini dari segi Fatwa DSN MUI dan UU Pasal 25 No 7 tahun 2011 Tentu tidak nilai yang berimbang dengan cara jual beli uang rusak ini tidak sesuai dengan Fatwa MUI dan UU NO 7 tahun 2011, riset penelitian ini di lakukan dengan penelitian Kulitatif yang di mana di lakukan penelitian lapangan dengan cara ovservasi Langsung sesuai fakta lapangan beserta data data yang di ambil dari penelitian terdahulu sehingga terbentuknya penelitian ini, Penliti melihat di lapangan banyak kejanggalan yang dimana tidak kesuaian jual beli Uang rusak yang dimana penjual banyak di rugikan sama pembeli, sedangkan berdasarkan DSN MUI jual Beli Uang Rusak di haramkan karena mengandung Unsur Riba Sedangkan Bdasarkan UU Pasal 25 NO 7 tahun 2011 tidak dibenarakan karena tidak sesuai yag dimana Uang tidak boleh di jualbelikan, kecuali dilakukan dengan penggantian nominal yang sama, atau adanya akad jasa (ujrah) bahwa transaksi tersebut adalah transaksi jasa penukaran uang rusak, dimana salah satu syaratnya adalah diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak dalam upah mengupah. Dengan demikian, praktik ini dapat dikatakan sebagai penyediaan jasa penukaran, bukan termasuk jual beli mata uang (al-sharf).

Kata Kunci: Jual Beli Uang Rusak, DSN MUI, UU NO 7 2011.

ABSTRACT

Abstract The purpose of this study is to see the Analysis of the Sale and Purchase of Damaged Money Based on DSN MUI NO 28 MUI 2002 Concerning the Sale and Purchase of Currency Law Article 25 NO 7 of 2011 in Tanjung Village, Padang Tualang District, Langkat Regency. The reason for this research is because in Tanjung Village, Padang Tualang District, Langkat Regency, there have been many damaged money transactions since year to year, so researchers are interested in conducting this research in terms of the DSN MUI Fatwa and Law Article 25 No. 7 of 2011. Of course, there is no balanced value with the way this damaged money is sold and bought, which is not in accordance with the MUI Fatwa and Law No. 7 of 2011. This research was conducted with qualitative research, where field research was conducted by means of direct observation according to field facts along with data taken from previous research so that this research was formed. Researchers saw in the field many irregularities where there was no conformity in the sale and purchase of damaged money where the seller was greatly disadvantaged by the buyer, while based on the DSN MUI, the sale and purchase of damaged money is prohibited because it contains elements of usury. While based on Law Article 25 NO. 7 of 2011 it is not justified because it is not in accordance with which money may not be traded, unless it is done with the same nominal replacement, or there is a service agreement (ujrah). that the transaction is a transaction of damaged money exchange services, where one of the requirements is that the amount is known by both parties in the wages. Thus, this practice can be said to be the provision of exchange services, not including the sale and purchase of currency (al-sharf).

Keywords: Damaged Money Sale And Purchase, DSN MUI, Law No. 7 2011.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial, dimana manusia tidak bisa hidup sendiri dan merupakan makhluk yang memiliki kodrat bermasyarakat, sehingga jika hendak melakukan sesuatu diperlukan bantuan dari orang lain yang hidup bersama-sama dalam masyarakat yang saling berhubungan satu sama lain. Dan untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya manusia tidak bisa terlepas dari yang namanya muamalah. Muamalah sendiri dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Secara bahasa, muamalah berasal dari kata “aamala-yuaamilu mu’amalatan” sama dengan wazan “faa’ala-yufaa’ilu mufaa’alatan” yang artinya saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilah syara’, muamalah ialah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan kata lain, Islam sendiri telah mengatur dan memberikan kebijakan yang jelas, terutama sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan transaksi jual beli. Dapat dipahami bahwa dalam kegiatan transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat, transaksi terjadi pada benda atau harta. Dalam hal ini jual beli menggunakan uang dengan segala jenis transaksi mesti menggunakan uang, saat ini mata uang sangat lah penting dalam kehidupan sehingga manusia tak luput dengan uang. Selain itu uang juga sebagai transaksi untuk membayara hutang piutang terdaap orang lain.

Uang adalah hal yang sangat vital dalam kehidupan sehari hari. Definisi uang dapat dilihat dari dua perspektif yakni hukum dan fungsional. Tujuan utama penciptaan uang ialah untuk digunakan sebagai alat tukar resmi guna memperlancar transaksi. Mata uang dianggap sebagai medium yang disepakati oleh masyarakat dalam melakukan pertukaran barang dan jasa. Namun, di beberapa kasus, uang dapat mengalami kerusakan, seperti lubang, sobek, terbakar, hilang sebagian ata mengerut dari bentuk aslinya. Uang yang mengalami kerusakan ini masih diterima sebagai alat pembayaran dalam masyarakat, asalkan kondisinya masih dapat diterima secara umum. Penukaran mata uang rupiah yang telah rusak tersebut masih bisa ditukar dengan syarat tanda keaslian uang tersebut bisa diketahui. Mata uang rupiah yang tidak layak ini bisa di ganti dengan uang yang baik sesuai dengan peraturan pada Bank Indonesia. Dimana penukaran mata rupiah yang rusak dilakukan oleh pihak pengedar uang yakni Bank Indonesia, dimana Bank Indonesia yang beroperasi di setiap daerah atau pihak lain, seperti Bank Umum atau Oney Changer yang telah ditentukan oleh Indonesia. Uang rusak tidak dapat untuk transaksi jual beli jenis uang yang dimaksud di dalam penelitian ini ialah, uang koyak, uang sobek uang yang di setempel, berdasarkan asail ovservasi peneliti lakukan di Desa Tanjung Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, diperoleh keterangan bahwa uang yang rusak atau cacat tidak akan laku untuk digunakan sebagai alat transaksi jual beli pada hampir semua toko ataupun warung yang ada di Desa Tanjung Kec. Padang Tualang Kab. Langkat.

Oleh karena itu orang memilih menjual uang rusak yang dimiliki kepada para pembeli uang rusak untuk ditukar dalam bentuk uang yang utuh dan tidak cacat adalah agar uang tersebut dapat kembali digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Transaksi jual beli uang rusak di Desa Tanjung Kec. Padang Tualang Kab. Langkat tersebut dapat dilakukan dengan cara mendatangi langsung pihak pembeli atau didatangi oleh pihak pembeli dengan cara pembeli berkeliling di setiap pasar-pasar dan rumah-rumah warga, terutama yang membuka warung dengan menawarkan jasa penukaran uang rusak. Kriteria uang rusak yang diperjual belikan di Desa Tanjung Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, yaitu uang yang mengalami kerusakan kurang dari atau sama dengan dua pertiga dari aslinya, sobek menjadi dua atau tiga bagian, dimakan rayap, berlubang, serta terkena coretan. Nominal uang yang akan dibayarkan oleh pembeli kepada penjual untuk uang rusak yang ditukarkan tidak dipatok dengan harga khusus. Namun, harga akan diperkirakan oleh pembeli tergantung seberapa rusak uang yang akan dibeli. Kerusakan yang semakin parah akan membuat harga yang

dibayarkan semakin rendah. Dalam transaksi jual beli uang rusak tersebut, objek transaksi, yakni uang yang rusak, selalu dibeli dan dibayar dengan uang yang nominalnya di bawah nominal yang tertera pada uang tersebut. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dalam Bab IV Penukaran Rupiah Pasal 22, disebutkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai dan kondisi yang layak edar, rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditentukan sebagai berikut: (1) penukaran rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain, (2) penukaran rupiah yang lusuh atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya. Tujuan diciptakannya uang adalah untuk memperlancar kegiatan transaksi perdagangan dalam perekonomian. Mata uang selalu didefinisikan sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Maksud dari kata “disetujui” dalam definisi ini adalah terdapat kata sepakat di antara anggota-anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantara dalam kegiatan tukar menukar. Inilah yang dijelaskan oleh Imam Ghazali bahwa emas dan perak hanyalah logam yang di dalam substansinya (zat itu sendiri) tidak ada manfaatnya, atau tujuan-tujuannya. Uang yang rusak adalah uang rupiah yang bentuk atau ukurannya telah berubah dari aslinya. Beberapa penyebab uang rusak, yaitu berlubang, sobek, terbakar, hilang sebagian atau mengerut. Sementara, menurut Panduan Penukaran Uang Tidak Layak Edar, uang dikategorikan sebagai uang rusak apabila keadaan fisik dari uang tersebut tidak utuh karena hilang sebagian dengan ukuran lebih dari 50 mm² bagian, mengalami perlubangan lebih dari 10 mm², terkena coretan, sobel lebih dari 8 mm², terkena selotip lebih dari 225 mm², ataupun terbakar sebagian bentuknya. Jual beli sendiri dalam ajaran Islam hukumnya boleh dilakukan. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa dalam hal ini objek dalam jual beli adalah uang. Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa khusus yang memuat aturan mengenai transaksi jual beli uang, yaitu Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf). Pada ketentuan umum bagian pertama dalam fatwa tersebut, dijelaskan bahwa transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan tidak untuk spekulasi atau untung-untungan, ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (untuk simpanan), apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (attaqabud), apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan secara tunai.

METODOLOGI

Metode adalah opsional untuk artikel penelitian asli. Metode ini ditulis secara deskriptif dan harus memberikan pernyataan tentang metodologi penelitian. Metode ini sebaik mungkin memberikan gambaran kepada pembaca tentang metode yang digunakan. Metode ini opsional, hanya untuk artikel penelitian asli.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif empiris, tujuannya untuk memahami secara mendalam tentang Analisis Jual Beli Uang Rusak Berdasarkan Fatwa DSN MUI No 28 MUI III 2002 Tentang Jual Beli Mata Uang Pasal 25 UU No 7 Tahun 2011 di Desa Tanjung Kec. Padang Tualang Kab Langkat, melalui pengumpulan data langsung di lapangan seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode ini dilakukan untuk sebuah bahan yang berkenaan dengan materi-materi yang akan diteliti. Referensi tersebut berupa buku dan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti guna menemukan konsep teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir, serta merupakan titik tolak untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah

studi kasus, dengan melakukan pengamatan mendalam di kedua lokasi penelitian. Penelitian bersifat empiris, karena data primer dikumpulkan langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis, dilakukan dengan cara menggambarkan fakta yang ada, sehingga lebih mudah untuk dipahami, kemudian dianalisis lalu disimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Tanjung adalah Desa yang terletak di Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, Desa Tanjung Memiliki Empat Dusun Dengan Rata –Rata memiliki Lima Ratus Kepala Rumah Tangga Persatu Dusun Nya, Mayoritas di Desa Tanjung Beragama Islam , Namun Jual Beli Uang Rusak yang menjadi masalah di Desa Tanjung Aktivitas jual beli uang rusak yang sangat meningkat hal ini tidak selaras dengan ketentuan Undang -Undang dan Fatwa DSN MUI , hal ini sangat berdampak buruk kepada kalangan Masyarakat Desa Tanjung tentang Pemahaman ini.

Dalam Padangan DNS MUI DAN UU NO 7 tahun 2011 jual beli uang rusak tidak di perbolehkan. DSN MUI berpendapat jual beli uang rusak adalah hal yang di larang karena mengandung unsur riba.karena jual beli uang rusak adalah riba di sebabkan ada unsur ketidak samaan dalam mata uang tersebut.

Jual Beli Rusak Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 28 MUI III 2002

Jual beli yaitu suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara dua pihak, dimana yang satu memberikan benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah ditentukan syara'. Sedangkan pengertian Ash-Sharf secara bahasa memiliki arti, yaitu kelebihan, tambahan dan menolak. Adapun secara terminologi, Ash-Sharf adalah pertukaran dua jenis barang berharga atau jual beli uang dengan uang atau disebut juga valas, atau jual beli antara barang sejenis secara tunai, atau jual beli pertukaran antara mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain.

Ulama fiqih mendefinisikan Ash-Sharf sebagai mempejual belikan mata uang dengan mata uang yang sejenis dengan mata uang yang tidak sejenis. Dalam literatur fiqih klasik, pembahasan ini ditemukan dalam bentuk jual beli dinar dengan dirham, dirham dengan dirham, atau dinar dengan dirham. Menurut Syauqi Ismail Syahatah seorang ahli fiqih dari mesir, bernilai 4,51 gram emas. Menurut jumhur ulama 1 dinar yaitu 12 dirham dan menurut ulama mazhab hanafi, yaitu 10 dirham. Perbedaan harga dinar tersebut terjadi karena fluktuasi mata uang di zaman mereka masing-masing. Pada masa kini, bentuk jual beli mata uang banyak dilakukan oleh bank-bank devisa atau para money changer, misalnya jual beli rupiah dengan dollar atau dengan mata uang asing lainnya. Saat melakukan tukar menukar antara mata uang kertas, baik dengan jenis yang sama maupun dengan jenis mata uang yang berbeda, disyaratkan serah terima harus sudah terjadi sebelum kedua belah pihak meninggalkan tempat transaksi dan tidak dibolehkan menunda pembayaran. Kalau tidak, maka transaksi tersebut hukumnya tidak sah.

Jual beli mata uang dilakukan baik antara negara maupun dalam suatu negara. Transaksi dapat dilakukan oleh suatu badan/perusahaan atau secara perorangan dengan berbagai tujuan. Dalam setiap kali melakukan transaksi jual beli valuta asing, maka digunakan kurs (nilai tukar). Nilai tukar ini dapat berubah-berubah sesuai kondisi dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi dan politik.

Mengenai Ash-Sharf sebagai salah satu kegiatan usaha bank di sektor jasa memiliki landasan syariah yang terdapat dalam hadits nabi: “dari Umar bin Al-Khattab Radhiyallahu Anhu, dia berkata: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Jual beli emas dengan emas adalah riba kecuali serah terima secara langsung, jual beli gandum adalah riba kecuali

serah terima secara langsung, jual beli kurma dengan kurma adalah riba kecuali serah terima secara langsung, jual beli jelai adalah riba kecuali dengan serah terima secara langsung. Dan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallahu Alaihi wa Sallam bersabda: Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan yang sama dan perak dengan perak kecuali dengan ukuran yang sama. Tidak boleh ditambah sebagian atas sebagian lainnya dan tidak boleh menjual barang yang tidak ada dengan yang ada. Dalam pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa selain melakukan kegiatan usaha.

Penukaran Valas merupakan jasa yang di berikan bank syariah untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama (single currency) maupun berbeda (multi currency), yang hendak di tukarkan. Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh di lakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
2. Pada transaksi yang dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh)
3. Pada transaksi yang berlainan jenis mata uang maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

.Jual Beli Rusak Berdasarkan Pasal 25 UU Nomor 7 Tahun 2011

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dalam Bab IV Penukaran Rupiah Pasal 22, disebutkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai dan kondisi yang layak edar, rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditentukan sebagai berikut: (1) penukaran rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain, (2) penukaran rupiah yang lusuh atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya.

Berdasarkan UU NO 7 Tahun 2011 jual beli mata uang atau tukar uang di perbolehkan namun tidak halnya dengan jual beli uang sobek, koyak atau uang palsu.

Jual Beli Uang Rusak Di Desa Tanjung Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat.

Jual beli uang rusak di Desa Tanjung Kecamatan Padang tualang Sudah Menjadi Kebiasaan dari jaman ke jaman hal ini di sebabkan meningkatnya kabutuhan masyarakat tersebut sehingga tukar menukar atau jual beli uang rusak adalah menjadi ajang bisnis semata kebutuhan masyarakat akan fungsi uang itu sendiri sebagai alat tukar menukar.

Dengan adanya pertumbuhan penduduk menyebabkan kebutuhan pada sektor perekonomian bertambah. Hal tersebut membuat sebagian masyarakat menjadi berpikir kreatif untuk dapat memutar penghasilannya sehingga dapat mencukupi semua kebutuhan, salah satu cara tersebut dengan melakukan bisnis penyedia jasa penukaran uang rusak. Dalam praktik tukar-menukar tersebut yang dijadikan objeknya adalah uang. Dimana uang dengan uang dapat menghasilkan uang. Faktor yang mempengaruhi praktik jual beli mata uang rusak Walau hal ini melanggar Fatwa DSN MUI namun masyarakat tetap melakukan hal tersebut akibatnya masyarakat tidak mengetahui aturan tersebut, sebab kurangnya edukasi bersama serta pemerintahan Desa setempat tentang edukasi jual Beli Uang Rusak tersebut.

Tabel Jumlah penduduk Yang Melakukan Jual beli Uang Rusak Dan yang Tidak melakukan Jual Beli Uang Rusak Di Desa Tanjung kecamatan Padang Tualang.

Tabel 1. Penduduk Yang melakukan Jual Beli Uang Rusak dan Tidak Melakukanya

Nama Dusun	Jumlah Penduduk	Melakukan Jual Beli Uang Rusak	Tidak Melakukan Jual Beli Uang Rusak
Sido Dadi	430	100	330
Sido Bangun	470	125	335
Sido Mukti	450	60	390
Sido Sari	500	20	480

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian di atas penulis dapat menarik kesimpulan , Jual beli Uang Rusak yang di lakukan di Desa Tanjung Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat , Jual Beli uang rusak sudah dilakukan bertahun tahun sehingga Jual Beli Uang Rusak sudah menjadi kebiasaan di Desa Tanjung sehingga Jual beli Uang rusak menjadi ajang bisnis semata dan juga untuk menambah kebutuhan keluarga.

Jual Beli uang Rusak Bedasarkan Fatwa DSN MUI tidak di benarkan Karena sudah jelas Jual beli uang itu hukum nya riba karena mengandung unsur keuntungan sebelah pihak.jelas yang di lakukan di Desa Tanjung ini sangat melanggar fatwa DSN MUI karena meakukan Jual Beli Uang Rusak

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dalam Bab IV Penukaran Rupiah Pasal 22, disebutkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup. jual beli mata uang atau tukar uang di perbolehkan namun tidak hal nya dengan jual beli uang sobek, koyak atau uang palsu.

DAFTAR PUSTAKA

Alfaruq M, Harun H, Habi N, F. 2023. Jual Beli Uang Rusak Perspektif Hukum Bisnis Syariah. *Jornal Imprehensive Islamic Studies*, 2(2)

amayanti, A. (2018). *Transaksi Jual Beli Uang Rusak dalam Perspektif Ekonomi Islam*. (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro, Lampung

DSN-MUI. (2002). *Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor:28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)*.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alphabe

Moleong J. Lexy, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004,

Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sector Public*,Yogyakarta: unit Penerbit dan percetakan Akademi Manajemen Perusahaan JKPN, 2005.

Syaifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998),

Erlianti Neli, Febriadi Sandy Rizki, Anshori Arif Rizal. 2022. *Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 terhadap Penukara Uang Rusak di Alun-Alun Kota Bandung*. Bandung Conference Series: Sharia Economic Law, 2(2)

DSN-MUI. (2002). *Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor:28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)*.

Zahra, Anggraini Enggita Dwi, Sumarno Dicky, Za'far Yanuar Aditya, Rohman Moh Faizur. 2023. *Pandangan Tokoh Masyarakat dan Pedagang Wonocolo terhadap Penggunaan Uang Rusak atau Cacat pada Transaksi Jual Beli dalam Perspektif UU No. 7 Tahun 2011*. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(1)

Wawancara dengan Bapak Narto Selaku warga Desa Tanjung Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat 20 Januari 2025.